



Agen tunggu surat Pertamina

▶ Pemkot Jogja ajukan permintaan minyak tanah

Oleh Andri Setyawan & Jumali
HARIAN JOGJA

JOGJA: Saat ini di wilayah Kota Jogja dan Sleman sangat susah mencari minyak tanah (minah), sebagai dampak dari penarikan minah per 10 November lalu. Masalahnya, hingga saat ini PT Pertamina (Persero) belum juga menyuplai minah nonsubsidi di kedua wilayah tersebut.

Wakil Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DIY, Siswanto, mengatakan hingga saat ini minah di kedua wilayah tersebut tidak ada.

"Itu tak lain karena agen-agen masih menunggu surat pengangkatan sebagai agen dari PT Pertamina," ujar Siswanto ketika dihubungi Harian Jogja, kemarin.

Dia menambahkan pihaknya memperkirakan surat dari Pertamina akan turun dalam waktu dekat.

Dengan turunnya surat tersebut, para agen bisa berjualan minah. "Mungkin dalam pekan depan sudah (turun)," harapnya.

Sulitnya mendapatkan minah ini dikeluhkan oleh beberapa warga. Suryanto (32), menuturkan dengan ditariknya minah akan semakin menambah beban warga.

Menurutnya, kebijakan ini sama saja dengan pemaksaan kepada masyarakat untuk menggunakan gas.

"Daripada beli mahal, terpaksa beli gas," kata Siswanto.

Keluhan serupa diungkapkan Rahayu (25). Dia mengatakan di daerah Sleman banyak warga yang masih menggunakan kayu bakar. Jika minah ditarik, warga harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli minah bersubsidi. "Kan untuk pemantik saat membakar kayu," ujarnya.

Kalangan Dewan pun mengekspresikan kekecewaan mereka.

Anggota Komisi B DPRD DIY, Esti Wijayati, mengatakan kebijakan pemerintah itu sangat memberatkan masyarakat. "Banyak sektor usaha yang tergantung minah, seperti batik atau tembakan."

Menurut Esti, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Pasalnya, banyak sektor-sektor usaha yang tergantung pada minah.

Karenanya, dia meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk menekan dan mendesak pemerintah pusat agar pencabutan subsidi tidak dilakukan. "Banyak warga yang tidak bisa dan belum bisa menggunakan gas," katanya.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Afnan Hadikusumo, mengatakan sosialisasi minah ke gas masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keengganan masyarakat untuk menggunakan gas. "Banyak warga yang khawatir penggunaan gas bakal menimbulkan ledakan dan kebakaran," ujar Afnan.

Dia menambahkan seharusnya pemerintah mengoptimalkan sosialisasi terlebih dahulu.

● *Bersambung ke hal.23. kol 4*

“ Apa warga harus menghidupkan lampu teplok dengan menggunakan gas elpiji? ”

M Arifin
Asisten Daerah I Kota Jogja

● **Agen tunggu...**
Diperoleh pula informasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memastikan akan mengirimkan surat ke PT Pertamina terkait dengan masih banyaknya warga yang membutuhkan minah bersubsidi pascapenarikan minah bersubsidi, 10 November lalu. Asisten Daerah (Asekda) I Kota Jogja, M Arifin, Rabu (12/11), mengatakan meski PT Pertamina telah melakukan penarikan minah bersubsidi pada 10 November lalu, saat ini masih banyak warga yang membutuhkan minah. Terutama untuk menghidupkan beberapa peralatan pengganti listrik, karena saat ini proses gilirannya atau pemadaman listrik di Kota Jogja masih berlangsung.

"Masih banyak yang membutuhkan, apalagi saat ini sering terjadi listrik mati. Apa warga harus menghidupkan lampu teplok dengan menggunakan gas elpiji?" tanya Arifin. Arifin menerangkan sebelum melayangkan surat ke PT Pertamina yang berisi permintaan minah bersubsidi di Kota Jogja, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Dinas Perindustrian Kota Jogja. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kuota yang dibutuhkan. "Jika memang tidak bisa dipenuhi, kami juga tidak akan memaksakan, yang jelas kami sudah berusaha," tandas Arifin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 22 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005